Budi Arie Akan Diperiksa Ulang .....

Dari Halaman 1

Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pernah memeriksanya pada Desember 2024.

Kini saat Budi menjabat sebagai Menteri Koperasi, namanya mencuat senyampang sidang terkait pemblokiran situs judol bergulir.

“Ya tentunya, kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk hakim seperti apa,” kata Sigit.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 14 Mei 2025, nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan Zulkarnaen Apriliantony.

Dalam surat dakwaan bernomor register PDM-32/JKTSL/Eku.2/02/2025, ada uraian persentase jatah masing-masing dari praktik penjagaan situs judi online.

"Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga," ungkap jaksa.

Bantahan Budi Arie

Budi Arie membantah tudingan bahwa dirinya menerima 50 persen dari uang hasil perlindungan situs judi online yang diduga dilakukan sejumlah pegawai Kementerian Kominfo.

"Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar," ujar Budi Arie, dilansir dari Kompas.com, Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa alokasi 50 persen dari hasil perlindungan situs judi online yang disebutkan dalam dakwaan adalah hasil kongkalikong di antara para terdakwa, dan bukan merupakan inisiatif atau permintaan darinya.

"Itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu, apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada," tegas Budi Arie.

Pemeriksaan Desember 2024

Pada 19 Desember tahun lalu, Budi Arie diperiksa sebagai saksi kasus itu, dari sekitar pukul 10.00 WIB pagi sampai pukul 17.00 WIB sore.

Namun Budi mengaku hanya diperiksa dua jam. Ketika ditanya materi dan pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak kepolisian, Budi meminta awak media mengonfirmasi hal itu ke penyidik yang memeriksanya.

“Terkait materi dan isi yang saya berikan hari ini, silakan tanyakan ke penyidik yang berwenang,” kata Budi usai pemeriksaan kala itu. **(kps/js)**

Admin Grup 'Fantasi Sedarah' Ditangkap .....

Dari Halaman 1

diperkuat untuk menindak kasus serupa.

"Tindakan ini menjadi pesan kuat bahwa negara tidak diam terhadap kejahatan di ruang digital. Ini bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat dari konten-konten menyimpang," ujar Martin.

"Koordinasi antarunit seperti ini sangat penting dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Ini bisa menjadi model kerja sama untuk kasus-kasus lain ke depan," tambahnya.

Martin pun berharap ada langkah berkelanjutan dalam bentuk edukasi dan peningkatan literasi digital. Martin meminta Kominfo untuk memperkuat sistem pengawasan digital.

"Penting bagi kita semua, terutama aparat dan lembaga terkait, untuk mendorong literasi digital agar masyarakat bisa lebih selektif dan sadar terhadap konten-konten menyimpang. Kominfo harus memperkuat sistem pengawasan digital. Jangan sampai ruang maya kita dijadikan tempat subur bagi perilaku menyimpang," ujarnya.

Adapun Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (20/5), menyatakan para pelaku sudah diamankan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait motif dan potensi tindak pidana lain yang dilakukan pelaku.

Polisi mengungkap tidak tertutup kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus ini. Bareskrim Polri menelusuri grup ini berisikan ribuan member.

"Dittipidsiber Bareskrim Polri bersama Ditsiber Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka dengan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku," ujar Trunoyudo.**(det/js)**

Kejagung Tangkap Dirut Sritex 2014-2023 .....

Dari Halaman 1

PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit dari perbankan.

Harli mengatakan, meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian fasilitas kredit oleh perbankan dilakukan perusahaan plat merah.

Harli menjelaskan aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara secara eksplisit menyatakan bahwa keuangan daerah juga merupakan keuangan negara.

Dengan dasar UU itu, Harli menyebut apabila ditemukan tindakan melanggar hukum terkait pemberian fasilitas kredit terhadap perusahaan keluarga Lukminto itu masuk dalam kategori korupsi.**(cnni/js)**

Situasi di Gaza Mengerikan .....

Dari Halaman 1

majelis rendah dalam Parlemen Britania Raya, saat menyampaikan pidato tentang "mengulang kesepakatan" Inggris dengan Uni Eropa, Selasa (20/5/2025), Starmer menegaskan kembali penolakan Inggris terhadap keberadaan permukiman di Tepi Barat. Dia pun menekankan tuntutan Inggris atas adanya peningkatan besar-besaran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

"Saya ingin mencatat hari ini bahwa kami sangat terkejut dengan eskalasi yang dilakukan Israel," katanya menambahkan.

Terkait pengumuman terbaru pemerintah Israel bahwa bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza dalam jumlah yang dasar saja, Starmer mengatakan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak memadai.

"Kita tidak bisa membiarkan rakyat Gaza kelaparan," tegas Starmer.

Israel menolak seruan internasional untuk gencatan senjata. Angkatan bersenjata rezim Zionis ini telah mengobarkan perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak serangan lintas batas para pejuang gerakan kemerdekaan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sejak itu, Israel telah membunuh hampir 53.500 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.**(rep/js)**

Gerindra Dorong Prabowo Jadi Presiden .....

Dari Halaman 1

Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam sambutannya di acara pemberian bantuan keuangan partai politik di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5).

Pemerintah melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, pada kesempatan itu memberikan bantuan kepada Gerindra selaku partai pemenang pemilu sebesar Rp20 miliar.

Muzani mengakui bahwa kantor DPP Gerindra memiliki kantor yang mewah. Namun, menurut dia, Prabowo terus berpesan agar semua kader tetap berjuang apa adanya dan dalam keterbatasan apapun.

"Itu sebabnya, Pak Bahtiar, kita berjuang berpikir untuk menjadikan beliau [Prabowo] jadi dua periode," kata Muzani.

"Beliau juga menitipkan kami bahwa perjuangan harus realistis, perjuangan harus mendasarkan kekuatan apa adanya. Dan inilah kantor yang disaksikan pemikiran-pemikiran beliau bersama kami," imbuhnya.

Namun, meski memiliki kantor sederhana, Muzani menyebut kantor partainya sejak awal menjadi tempat untuk berpikir hal besar tentang rakyat dan negara.

Dia menyebut kantor partainya terus digunakan untuk membahas strategi pemenangan partai dari pemilu ke pemilu, hingga akhirnya menjadi Prabowo sebagai presiden. Menurut Muzani, semua perjuangan partai berawal dan dilakukan di kantor yang berada di kawasan Ragunan tersebut.

"Dan di kantor yang sederhana ini, kami berpikir, yaitu dari pemilu ke pemilu, dari pemilu ke pemilu bagaimana meningkatkan kepercayaan rakyat dan menjadikan Prabowo sebagai presiden. Sampai akhirnya Prabowo jadi Presiden," katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melarang kader untuk meneriaki dirinya maju kembali sebagai presiden dua periode. Prabowo mengaku berterima kasih atas dukungan kader kepada dirinya untuk kembali maju di Pilpres 2029, namun dia meminta agar hal itu tak lagi dilakukan.

Prabowo menyebut bahwa kepemimpinannya saat ini bahkan belum genap satu tahun. Dia meminta agar dukungan itu disimpan dalam hati terlebih dahulu.

Prabowo mengaku akan memutuskan sendiri apakah dia akan maju di periode kedua. Dia akan membuat parameter untuk mengukur kelayakannya maju di Pilpres 2029.

"Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri," kata Prabowo saat memberi pidato di acara Kongres IV organisasi sayap pemuda Gerindra, PP Tidar, di Hotel Burobudur, Jakarta, Sabtu (17/5).

"Kalau saya menilai, saya menilai, bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidka mau maju lagi sebagai presiden RI," imbuhnya.**(cnni/js)**

FKPPN Minta Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko .....

Dari Halaman 1

yang dilakukan oleh PTPN IV Palmco. Keputusan ini jika nanti direalisasikan menurut akan sangat bertentangan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo,Subianto yang menyatakan BUMN harus bisa memberi manfaat bagi rakyat," tegas HR Heru Pradoyo kepada wartawan di Medan, Rabu (21/5/2025), usai menyampaikan aspirasi pensiunan kepada Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting.

"Alih alih memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat bahkan hak yang selama ini jauh dari kata layak malah ingin dihapuskan,"imbuh Heru Pradoyo menambahkan.

Dijelaskan, ratusan ribu pensiunan PTPN adalah rakyat Indonesia yang selama ini menggantungkan penghidupan dari perusahaan BUMN Perkebunan tersebut. "Kontribusi yang diberikan selama ini jangan dianggap tidak memberi manfaat untuk kondisi saat ini. Menurut saya kebijakan ini harus dibatalkan," ungkap Heru Pradoyo dihadapan pengurus DPN FKPPN lainnya diantaranya Wakil Ketua Umum DPN FKPPN, Zulkifli Siregar dan Sulaiman Lubis.

Dikatakan, jika dibandingkan dengan pensiunan ASN maka kehidupan pensiunan perkebunan bagaikan langit dan bumi. Sebab pensiun ASN semakin pensiun semakin sejahtera, sementara pensiun PTPN semakin merana,elain hak yang diterima jauh dibawah kata sejahtera.

"Kini sekarang malah ingin dikurangi, padahal pensiunan ASN dan pensiunan PTPN sama sama pernah memberi sumbangsih bagi negara ini, sungguh sangat tidak berkeadilan, kata Heru Pradoyo.

Maka dari itu, Heru Pradoyo menegaskan bahwa semua Ketua DPW FKPPN se Indonesia khususnya Yonizam selaku Ketua DPW FKPPN Provinsi Aceh, telah menyampaikan sangat kecewa dan prihatin dengan rencana penghapusan uang beras di Regional I dan II PTPN IV, yang dikabarkan akan disosialisasikan ada 20 Mei 2025

Lebih lanjut disampaikan, kondisi keuangan PTPN yang sudah membaik saat ini adalah berkat kontribusi bersama dari berbagai generasi mengingat ini merupakan perusahaan agrikultur, “ Jadi kalau hari ini perusahaan untung maka bukan berarti semata mata prestasi dan kinerja dari manajemen dan karyawan yang aktif saat ini saja. Namun tetap ada andil dari pendahulu yang sudah pensiun, jadi jangan dilupakan,"tukas Heru Pradoyo.

Menyikapi kebijakan tersebut, Heru Pradoyo berharap agar Direksi PTPN IV Palmco khususnya Dirut Jatmiko K Santosa, bersikap arif dan bijaksana, dan segera membatalkan rencana penghapusan komponen tunjangan beras dan manfaat kesehatan bagi para pensiun. Sebab disebut-sebut aya Dirut PAlmco secara masif menyampaikan rencana ini ke seluruh regional, dan menganggap bahwa memberikan fasilitas beras dan manfaat kesehatan bagi pensiunan sangat membebani perusahaan.

" Jika dihilangkan akan mengurangi beban. sehingga menurut saya sungguh amat berdosa jika menganggap pensiunan yang adalah pendahulu dan orang tua sebagai beban. Sebab sedikit banyaknya kami juga memberikan manfaat sehingga PTPN bisa seperti saat ini," jelas Heru Pradoyo.

Heru Pradoyo mengatakan jika tunjangan beras dan manfaat kesehatan ini dihapuskan oleh Dirut Palmco, maka sudah selayaknya Meneg BUMN segera melakukan perombakan dan mencopot jabatannya. "Sebab dirinya (Jatmiko K Santosa-red) dinilai tidak dapat melaksanakan perintah presiden Prabowo untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat,"tegasnya.

Ketika ditanya awak media apa respon FKPPN jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, maka dia memastikan ratusan rIbu karyawan pensiunan akan demo besar besaran ke DPR RI dan Istana Negara di Jakarta guna menuntut pencopotan Dirut Palmco dan melaksanakan 8 rekomendasi Rapimnas II FKPPN di Pekan Baru.

Kontradiktif dengan Holding

Dia juga menyatakan ada kontradiktif yang selalu dipaparkan Holding PTPN Group yang menyatakan keberhasilan perusahaan mencetak laba. "Lalu, .mengapa ada rencana penghapusan uang beras pensiunan?.Kalau perusahaannya bangkrut masih ada alasan valid,"bebernya.

"Sementara kalau perusahaan hanya mau untung besar dengan mengorbankan penghapusan uang beras karyawan itu namanya laba semu dan menzolimi pensiunan,"tambahya.

"Perusahaan harus berjuang dengan meningkatkan produktivitas bukan menghapus uang beras pensiunan.Banyak biaya-biaya lain yang bisa diefisienkan ,seperti tenaga honor, SPJ, Konsultan, rapat hingga jabatan yang ada merangkap maupun komisaris serta lainnya,"tutupnya mengakhiri.**(A-06)**

KPAI Ungkap .....

Dari Halaman 1

untuk menjadi PRT, itu pintu masuk banget," kata Maryati dalam paparannya.

"Begitu datang ke Jakarta, dimasukkan ke tempat yang tidak punya akses keluar masuk dan harus melayani para hidung belang dan menjadi ruang terselubung prostitusi," imbuhnya.

KPAI, lanjut Maryati, mengungkap bahwa selama tiga tahun terakhir hingga 2023, pihaknya total menerima 303 aduan terkait kasus tersebut. Aduan itu didominasi praktik prostitusi online terhadap anak di bawah umur.

"Secara umum, kasus yang diadukan kepada KPAI 3 tahun terakhir sampai 2023 itu ada 303 kasus, dan itu di antaranya memang pekerjaan anak, yaitu PRT anak," katanya.

Lewat RUU PPRT, dia mendorong agar ada pembatasan usia terhadap PRT minimal 18 tahun.

"Berikutnya kami mendorong sinkronisasi RUU PPRT karena batas usia minimum bekerja sebagai PRT sama dengan atau lebih dari 18 tahun. Itu sangat penting masuk sebagai substansi baru dalam draf ini," katanya.

Usul pembatasan usia minimal bagi PRT juga datang dari Komnas HAM dalam RDPU bersama Baleg DPR, Selasa (20/5), kemarin.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengusulkan batas minimal usia PRT adalah 18 tahun. Pembatasan usia untuk menghindari praktik eksploitasi anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak.

"Terkait ketentuan usia minimum. Kami mengusulkan sebagaimana kondisi faktual pekerja kita bahwa penentuan usia minimum dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni 18 tahun, karena hal ini penting untuk mencegah potensi eksploitasi yang selama ini terjadi pada anak," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam rapat.

Baleg DPR telah menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) selesai dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan bahwa RUU PPRT telah mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tak ingin pembahasannya terlalu berlarut-larut.

"Sesuai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa 3 bulan-4 bulan ini harus selesai, jadi mudah-mudahan tidak memerlukan waktu yang lama," kata Bob, Selasa.**(cnni/js)**

PHK Merajalela .....

Dari Halaman 1

(20/5).

Ia mengatakan, peningkatan signifikan penerima manfaat JKP terjadi pada Maret 2025. Penerima manfaat JKP mayoritas berasal dari jenis usaha aneka industri, perdagangan dan jasa,serta industri barang konsumsi. Jenis usaha ini identik dengan bisnis yang pada karya.

Sementara itu, dewan pengawas (dewas) BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah korban PHK tahun ini bakal tembus 280 ribu orang.

Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengatakan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang 2024 jumlah korban PHK mencapai 77,96 ribu. Sedangkan hingga April 2025, jumlah korban PHK telah mencapai 24,36 ribu pekerja.

"Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 diprediksi itu ada sekitar 280 ribu korban PHK. Ini baru prediksi," katanya.**(cnni/js)**

Menagih Janji Reformasi

Dari Halaman 1

kebebasan pers, pemilu demokratis, pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme, serta otonomi daerah. Sebagian telah tercapai secara struktural—kita kini hidup dalam sistem multipartai, menikmati kebebasan berpendapat, dan menyaksikan sirkulasi kekuasaan secara berkala.

Namun, substansinya belum sepenuhnya menyentuh akar. Korupsi masih bercokol, bahkan menjalar hingga sektor-sektor pelayanan dasar. Kebebasan sipil terancam oleh kriminalisasi aktivis dan pembatasan ruang berekspresi. Birokrasi makin gemuk, tapi pelayanan publik masih sering tersendat. Ketimpangan sosial tetap membelah negeri, dan elite politik masih sering bermain dalam pusaran kekuasaan, bukan pelayanan.

Ironisnya, banyak tokoh yang dahulu meneriakkan “Reformasi!” kini justru berada di jantung kekuasaan. Sebagian menjadi bagian dari struktur yang dulu ingin mereka ubah. Inilah paradoks reformasi—dari revolusioner menjadi birokrat, dari pejuang menjadi penjaga status quo.

Kini, di bawah pemerintahan baru yang akan segera dimulai, publik berharap adanya napas baru dalam meneruskan cita-cita reformasi. Namun tantangan makin kompleks: digitalisasi tanpa regulasi, otonomi daerah yang sering disalahgunakan, hingga penetrasi modal asing yang tak selalu berpihak pada rakyat kecil.

Peringatan Reformasi seharusnya bukan sekadar seremonial ziarah ke makam para korban tragedi atau tabur bunga. Ia harus menjadi momentum reflektif—apakah semangat mahasiswa 1998 masih hidup dalam diri kita hari ini?

Reformasi bukan hanya agenda perubahan struktural, tetapi juga soal etika dan nurani. Ia menuntut keberpihakan pada yang lemah, keberanian melawan ketidakadilan, serta kesetiaan pada konstitusi, bukan pada kekuasaan.

Generasi muda hari ini, yang tidak mengalami langsung 1998, menghadapi tantangan yang berbeda: disinformasi, apatisme digital, dan kooptasi politik lewat media sosial. Tugas mereka bukan hanya menjaga ingatan, tetapi juga menciptakan makna baru bagi reformasi di era teknologi dan globalisasi.

Mereka harus menyadari bahwa demokrasi bukan hadiah, tetapi warisan yang harus dirawat. Dan seperti halnya pada 1998, perubahan hanya akan datang jika ada keberanian untuk bersuara, berkumpul, dan bertindak bersama.

Kita tidak boleh lupa bahwa reformasi lahir dari darah dan air mata. Nama-nama seperti Trisakti, Semanggi, dan para korban penghilangan paksa menjadi saksi bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini tidak datang begitu saja.

Oleh karena itu, pada usia 27 tahun ini, marilah kita menagih kembali janji reformasi. Menolak lupa bukan hanya soal sejarah, tapi soal tanggung jawab moral: apakah kita masih memeluk cita-cita itu, atau justru telah menjadi penikmat hasilnya tanpa mau menjaga nilainya?

Reformasi belum selesai. Tapi harapan itu masih ada—selama kita tidak menyerah dan tetap percaya bahwa negeri ini bisa lebih adil, lebih demokratis, dan lebih manusiawi.